

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara, karena berkaitan dengan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh masyarakat. Indonesia sebagai negara agraris dengan berbagai potensi pertanian memiliki tantangan besar dalam memastikan ketahanan pangan, terutama di tingkat desa. Upaya penyuluhan tentang ketahanan pangan menjadi hal yang sangat penting dilakukan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. (Rumawas et.al., 2021)

Petani merupakan pelaku utama dalam kegiatan produksi pertanian serta bagian dari masyarakat indonesia yang perlu ditingkatkan kesejahteraan dan kecerdasannya, salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan petani dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan. Dengan adanya penyuluhan dapat membantu petani dalam menerima semua informasi pertanian yang sedang berkembang secara efektif, namun yang kita lihat sekarang masih banyak petani yang belum merasakan hasil maksimal dari kegiatan penyuluhan sehingga banyak petani yang masih hidup dalam kemiskinan. (Hamadal, 2019)

Penyuluhan pertanian mempunyai peranan yang begitu penting dalam pembangunan pertanian, sehingga dalam kegiatan penyuluhan pertanian seorang penyuluhan perlu adanya ilmu pengetahuan baru atau inovasi baru yang nantinya akan disampaikan atau diberikan kepada petani guna merubah perilaku dengan pembekalan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penyuluhan maka dalam melakukan kegiatan penyuluhan akan terasa lebih mudah.

Aceh merupakan salah satu provinsi penyumbang hasil pertanian di indonesia, dimana sektor pertanian berperan besar dalam perekonomian masyarakat Provinsi Aceh. Luas wilayah provinsi Aceh adalah 57.956 km², yang terdiri dari 23 wilayah kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 pemerintahan kota (BPS, 2021). Sebagian wilayah Aceh merupakan areal pertanian, mayoritas penduduk yang berdomisili di Provinsi Aceh berprofesi sebagai petani.

Aceh Utara merupakan kabupaten yang terletak di bagian Utara Provinsi Aceh, yang terbagi menjadi 27 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 3.296,86 km² dan jumlah penduduk sebanyak 614.640 jiwa. Kabupaten ini memiliki beberapa subsektor pertanian yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Berdasarkan sensus pertanian Aceh Utara Tahun 2023, subsektor tanaman pangan memiliki kontribusi tertinggi dibandingkan subsektor lainnya pada sektor pertanian sebesar 71,05 persen pada Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) dan 70,61 persen pada Jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP). Hal ini menunjukkan bahwa tanaman pangan merupakan subsektor unggulan pertanian Aceh Utara.

Kecamatan Dewantara adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang memiliki karakteristik pertanian dan perikanan yang cukup khas. Kecamatan Dewantara sebagian besar dihuni oleh petani yang mengandalkan pertanian tanaman pangan sebagai sumber utama mata pencaharian. Beberapa komoditas utama yang dibudidayakan oleh petani di kawasan ini meliputi: Padi, jagung, kedelai dan tanaman palawija lainnya. Meskipun sebagian besar penduduk bergantung pada pertanian tanaman pangan, faktor-faktor seperti perubahan iklim, serangan hama, dan bencana alam (seperti banjir atau kekeringan) sering menjadi tantangan besar yang mengancam ketahanan pangan di kecamatan Dewantara.

Tabel 1. Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan (Ton) di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

No	Tanaman pangan	Tahun (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi	389.880,35	393.477,55	367.839,56	341.551,61	341.552
2	Jagung	14.647,43	104.365,98	13.500,67	135.695,52	47.013
3	Kedelai	59,75	497,72	105,71	2.378,89	32.547,07
	Jumlah	404.341,25	498.341,25	381.445,94	381.445,94	421.112

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara (BPS, 2023)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan di Kabupaten Aceh Utara, terjadi ketidakmerataan produktivitas tanaman pangan di setiap kecamatan. Kondisi ini menjadi masalah utama yang berdampak negatif pada hasil produksi secara keseluruhan. Inilah yang menjadi perhatian utama pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan melakukan analisis kelompok berdasarkan jenis

produksi hasil pertanian. Pengelompokan ini diterapkan karena adanya variasi potensi hasil produksi pertanian tanaman pangan yang berbeda-beda di setiap wilayah di Aceh Utara, dengan tujuan mendukung optimalisasi program-program pemerintah di sektor pertanian tanaman pangan.

Tabel 2. Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan dengan Satuan (Ton) Per Kecamatan Periode Tahun 2023

No	Kecamatan	Padi	Jagung	Kedelai
1	Muara Batu	1245634	80384	0
2	Sawang	3384510	1464144	479875
3	Nisam	2124935	224288	1198650
4	Nisam Antara	0	5747502	748385
5	Banda Baro	534000	261550	0
6	Dewantara	256300	40336	0
7	Kuta Makmur	1944460	1140480	1049450
8	Simpang Keramat	521400	1635738	819019
9	Syamtalira Bayu	1521131	0	0
10	Geuredong Pase	146491	271492	252500
11	Meurah Mulia	803842	5029	0
12	Samudera	461351	0	0
13	Syamtalira Aron	421225	0	0
14	Tanah Pasir	482278	0	0
15	Lapang	342654	9820	0
16	Tanah Luas	1291680	845208	309653
17	Nibong	241785	10042	168910
18	Matang Kuli	1163526	0	0
19	Pirak Timur	522480	256150	252077
20	Paya Bakong	1337569	101260	368456
21	Lhoksukun	2469824	371850	4928
22	Cot Girek	390303	275165	112545
23	Baktiya	2733995	417573	0
24	Baktiya Barat	1342752	10060	0
25	Seunuddon	1034601	0	0
26	Tanah Jambo Aye	1768410	293538	21710
27	Langkahan	602803	1005882	516594

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023

Data produksi yang disajikan dalam satuan ton mencerminkan jumlah total hasil panen yang berhasil dikumpulkan selama satu tahun berjalan. Penggunaan satuan ton bertujuan untuk memberikan ukuran yang baku dan dapat dibandingkan secara konsisten antar kecamatan maupun antar tahun. Ternyata berdasarkan kecamatan produktivitas tanaman pangan yang tinggi berada pada Kecamatan Sawang. Kemudian pada kecamatan yang lain nya terjadi ketidakmerataan produktivitas tanaman pangan. Adapun maksud utama dari penyusunan tabel 2 tersebut adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat produktivitas tanaman pangan di setiap kecamatan. Dengan kata

lain, tabel tersebut dapat menjadi representasi visual dari seberapa besar kontribusi masing-masing Kecamatan dalam mendukung produksi pangan secara keseluruhan di Kabupaten Aceh Utara.

Kelembagaan penyuluhan pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dewantara Kabupaten Aceh Utara meliputi 5 WKPP (Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian) dengan personil penyuluhan pertanian lapangan sebanyak 5 orang dan 1 WKPP (Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian) dirangkap oleh kepala BPP. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu mengadakan pelatihan setiap dua minggu sekali bagi para Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) dan melaksanakan pembinaan/supervisi ke setiap wilayah kerja penyuluhan secara tetap, teratur dan berkesinambungan. Data jumlah penyuluhan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Data Jumlah Penyuluhan Pertanian Di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dewantara

No	Nama Penyuluhan	Golongan	Wilayah Kerja	Keterangan
1	Murhadi	V	Koordinator BPP	P3K
2	Abdullah	III/d	WKPP Dewantara IV	PNS
3	Faridawati	III/a	WKPP Dewantara III	P3K
4	Yusrawati, SP.i	III/a	WKPP Dewantara II	PNS
5	Azhari	V	WKPP Dewantara V	P3K

Sumber : BPP Dewantara, 2023

Balai penyuluhan pertanian (BPP) Kecamatan Dewantara sebagai penyelenggara kegiatan penyuluhan memiliki petugas penyuluhan lapangan yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada petani. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan penyuluhan masih belum optimal, hal ini dipengaruhi oleh jumlah penyuluhan lapangan di Kecamatan Dewantara hanya berjumlah 5 orang penyuluhan PNS dan 6 orang penyuluhan swadaya dengan wilayah kerjanya berjumlah 15 Desa. Jumlah tersebut tidak sesuai karena banyaknya wilayah binaan bagi setiap penyuluhan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2023, tentang penguatan fungsi penyuluhan pertanian dengan revitalisasi penyuluhan pertanian dengan kebijakan 1 desa 1 penyuluhan untuk memfasilitasi pelaku utama. Berdasarkan wawancara pra survey dengan pihak BPP Dewantara proses penyuluhan yang dilakukan di Kecamatan Dewantara dalam menjalankan program ketahanan pangan tidak terjadwal dengan teratur. Sehingga beban kerja penyuluhan yang tinggi juga merupakan salah satu

tantangan tersendiri dikarenakan satu orang penyuluh harus membina beberapa desa sekaligus dengan jumlah petani yang cukup banyak dalam menjalakan tugasnya penyuluh pertanian tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi seperti kurangnya pemahaman dan kegiatan penyuluhan yang dapat mempengaruhi produktivitas dan pendapatan para petani . karena hal tersebut mendorong penulis tertarik mengambil penelitian tentang Proses dan Kendala Pelaksanaan Penyuluhan Program Ketahanan Pangan di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan timbul permasalahan yang menarik untuk diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses kegiatan penyuluhan pertanian dalam kegiatan program ketahanan pangan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dewantara?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh penyuluh dalam melakukan penyuluhan pertanian pada petani yang mengusahakan tanaman pangan di Kecamatan Dewantara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian yang sudah di jelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses kegiatan penyuluhan pertanian dalam program ketahanan pangan yang dilakukan oleh petugas penyuluhan pertanian yang ada di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dewantara.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh penyuluh dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian pada petani yang mengusahakan tanaman pangan di Kecamatan Dewantara.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Bagi penyuluh, dapat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan.
2. Bagi BPP diharapkan dapat menjadi sebagai bahan pertimbangan bagi intansi terkait guna meningkatkan mutu penyuluhan pertanian.

3. Bagi peneliti lanjutan, sebagai landasan dan bahan informasi untuk penelitian sejenis, serta dapat pula sebagai titik tolak untuk melaksanakan penelitian serupa dalam lingkup yang lebih luas.